

KHAZANAH

KEARSIPAN DAN BAHAN PUSTAKA

PAMERAN PEMBANGUNAN INDONESIA

KALA KINI NANTI



BAPPENAS

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional





DASAR POKOK DARIPADA PLAN MENGATUR EKONOMI INDONESIA 1947

Dasar Pokok Daripada Plan Mengatur Ekonomi Indonesia merupakan sebuah rancangan strategis dari para teknokratik bangsa untuk menciptakan kehidupan bangsa dan negara yang makmur serta sejahtera dengan membuat satu perencanaan yang taktis dalam bidang ekonomi bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang baru saja merdeka.

Dalam rancangan Dasar Pokok Daripada Plan Mengatur Ekonomi Indonesia ini berisikan rancangan strategis menjalankan perekonomian negara dengan tujuan yang harus dicapai adalah:

- 1) Mengintensifkan usaha produksi; 2) Memajukan pertukaran Internasional; 3) Mencapai standar hidup yang lebih tinggi; dan 4) mempertinggi derajat kecakapan dan kecerdasan rakyat.

Beberapa rencana strategis yang termuat dalam Rancangan untuk menuju tujuan yang diharapkan antara lain dengan: 1) mengatur jalannya Ekspor - Impor secara terkoordinasi; 2) Memberikan insentif kepada masyarakat dengan meningkatkan upah minimum, memperbaiki rumah rakyat, hingga menawarkan program transmigrasi dan pengembangan industrialisasi baik di Jawa maupun Luar Jawa; 3) Memperluas pembangunan sarana prasarana penunjang seperti pembuatan dan perbaikan jalan, irigasi, waduk, pelabuhan, dan lainnya; 4) memperkuat industrialisasi dalam negeri; dan 5) memperbanyak lahirnya perusahaan atau usaha rakyat.



GARIS-GARIS BESAR RENCANA PEMBANGUNAN LIMA TAHUN 1956-1960

Garis-Garis Besar Rencana Pembangunan Lima Tahun merupakan sebuah rancangan pembangunan untuk Indonesia dengan melihat dari sisi perkembangan ekonomi dalam negeri yang membentuk peta jalan terkait pembangunan Indonesia kedepannya.

Dilihat dari tingkat perekonomian Indonesia saat tersebut dikategorikan dalam "Stage of Self Generating Expansion" yang berarti perekonomian Indonesia memiliki kekuatan dan dinamika sendiri untuk berjalan dan menuju ke arah perkembangan setiap tahunnya. dengan tahap seperti ini, pada Garis-Garis Besar Rencana Pembangunan Lima Tahun diproyeksikan bahwa pada tahun 1975 Pendapatan Nasional untuk seluruh penduduk Indonesia akan berlipat dua kali. Hal ini diproyeksikan bahwa Rencana tersebut dapat diwujudkan tanpa bantuan luar negeri.



POLA PEMBANGUNAN SEMESTA BERENCANA 1961-1969

Pembangunan Nasional Semesta Berencana adalah suatu pembangunan dalam masa peralihan, yang bersifat menyeluruh untuk menuju tercapainya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Salah satu tujuan daripada pembangunan ialah memajukan Indonesia dari negara yang sebagian kehidupan masih dikuasai oleh imperialisme dan feodalisme, ke negara yang merdeka secara penuh.

Indonesia yang secara politik sudah merdeka menunjukkan bahwa dalam bidang ekonomi Rakyat masih tergantung dari pada suasana penjajahan. Banyak sektor ekonomi yang belum sepenuhnya dikuasai oleh negara atau Pengusaha Nasional. Oleh karena itu di samping angan-angan untuk mendirikan industri berat, industri pokok tidak juga dilupakan serta adanya keharusan untuk menguasai sektor ekonomi yang menjamin kelancaran pembangunan selanjutnya.





RENCANA PEMBANGUNAN LIMA TAHUN REPELITA KESATU 1969/70 - 1973/74

Bermula dari keadaan-keadaan yang terjadi membuat rakyat Indonesia masih berada di bawah kemakmuran tidak seperti yang diharapkan. Hal ini menimbulkan munculnya sebuah upaya untuk lebih memajukan Indonesia dari segala aspek. Melalui Ketetapan MPRS No. XXIII yang memiliki fokus pada pengendalian inflasi, pencukupan kebutuhan pangan, rehabilitasi prasarana ekonomi, peningkatan kegiatan ekspor dan pencukupan kebutuhan sandang. Untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut, maka salah satu garis kebijaksanaan yang terpenting adalah menciptakan iklim dekontrol dan debirokratisasi, sehingga memungkinkan berkembangnya daya kreasi masyarakat secara optimal, tanpa mengurangi pembimbingan Pemerintah melalui berbagai kebijaksanaan. Sehingga, tugas utama dari pemerintahan adalah: Menghentikan proses kemerosotan ekonomi dan membina landasan yang sehat bagi pertumbuhan ekonomi yang wajar.



RENCANA PEMBANGUNAN LIMA TAHUN REPELITA KEDUA 1974/75 - 1978/79

Seperi telah dikemukakan maka pembangunan jangka panjang dilaksanakan secara bertahap. Tujuan setiap tahap pembangunan dan dengan demikian juga menjadi tujuan Repelita II, ialah: pertama meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat, kedua meletakkan landasan yang kuat untuk tahap pembangunan berikutnya.

Sebagai kelanjutan dari Repelita I maka Repelita II berusaha mempertahankan dan meningkatkan hasil-hasil positif yang telah dicapai selama Repelita I sambil dipihak lain mengadakan penyempurnaan atas kekurangan-kekurangan dan sejauh mungkin menghindarkan akibat-akibat negatif yang timbul bersama dengan hasil-hasil yang dicapai.

Dalam rangka ini maka lima azas pembangunan nasional yang ditetapkan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara, yakni azas manfaat, azas usaha bersama dan kekeluargaan, azas demokrasi, azas adil dan merata dan azas perikehidupan dalam keseimbangan, harus menjiwal pola-pola pikiran dalam menuangkan perencanaan dan pelaksanaan program-program Repelita II.



RENCANA PEMBANGUNAN LIMA TAHUN REPELITA KETIGA 1979/80 - 1983/84

Sebagai kelanjutan dan peningkatan dari Repelita II, dalam Repelita III akan diperluas kegiatan pembangunan di berbagai bidang dan akan diberikan perhatian yang lebih mendalam kepada peningkatan kesejahteraan dan perluasan kesempatan kerja.

Demikian pula halnya dengan berbagai bidang atau masalah yang dalam Repelita II belum dapat sepenuhnya dipecahkan seperti peningkatan laju pembangunan di daerah-daerah tertentu, peningkatan kemampuan yang lebih cepat dari golongan ekonomi lemah, pembinaan koperasi, peningkatan produksi pangan dan kebutuhan pokok lainnya, transmigrasi, perumahan, perluasan fasilitas pendidikan, perawatan kesehatan dan berbagai masalah sosial lainnya.

Adapun Tujuan Repelita III adalah untuk :

(1) Meningkatkan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan seluruh rakyat yang makin merata dan adil, serta (2) Meletakkan landasan yang kuat untuk tahap pembangunan berikutnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut, dan dengan berpegang teguh kepada petunjuk Garis-garis Besar Haluan Negara, maka dalam pelaksanaan Repelita III dilanjutkan pembangunan yang berlandaskan pada Trilogi Pembangunan yang meliputi :

1. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menuju pada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat,
2. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi,
3. Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis



RENCANA PEMBANGUNAN LIMA TAHUN REPELITA KEEMPAT 1984/85-1988/89

Sebagaimana ditetapkan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) tujuan pembangunan Repelita IV ialah: Pertama, meningkatkan taraf hidup, kecerdasan, dan kesejahteraan seluruh rakyat yang semakin merata dan adil; dan Kedua, meletakkan landasan yang kuat untuk tahap pembangunan berikutnya. Dalam Repelita IV akan diusahakan terciptanya kerangka landasan untuk tumbuh dan berkembang terus agar kemudian dapat dimantapkan terus dalam Repelita V, sehingga dalam Repelita VI nanti bangsa Indonesia sudah benar-benar dapat tinggal landas untuk memacu pembangunan menuju terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

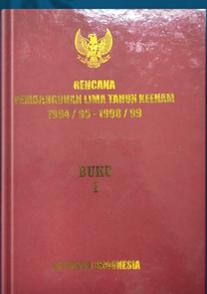


RENCANA PEMBANGUNAN LIMA TAHUN REPELITA KELIMA 1989/90-1993/94

Pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perkehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai. Untuk mencapai tujuan tersebut di atas dengan sebaik baiknya disusun Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang guna mengarahkan dan menyatukan langkah dalam pembinaan dan pembangunan bangsa. Sasaran utama Pembangunan Jangka Panjang adalah terciptanya landasan yang kuat bagi bangsa Indonesia untuk tumbuh dan berkembang atas kekuatannya sendiri menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Sesuai dengan penggarisan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), Pembangunan Jangka Panjang 25 tahun pertama, yang akan dirampungkan dengan selesainya pelaksanaan Repelita V, akan dilanjutkan, ditingkatkan dan diperluas dengan Pembangunan Jangka Panjang 25 tahun kedua yang dimulai dengan Repelita VI nanti.

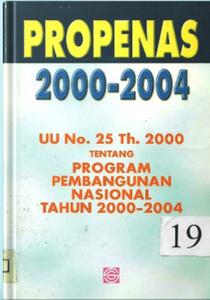
Seperti digariskan oleh GBHN, dalam Repelita V pelaksanaan kebijaksanaan pembangunan akan tetap bertumpukan pada Trilogi Pembangunan. Kerangka kebijaksanaan pembangunan seperti diuraikan di atas merupakan upaya untuk memadukan pertumbuhan ekonomi dan transformasi struktur ekonomi dengan pemerataan pembangunan khususnya melalui penciptaan lapangan kerja produktif yang makin luas dan merata, dengan pengembangan sumber daya manusia sebagai satu wahana sentralnya.



RENCANA PEMBANGUNAN LIMA TAHUN REPELITA KEENAM 1994/95 - 1998/99

Sasaran Umum Pembangunan Lima Tahun Keenam adalah tumbuhnya sikap kemandirian dalam diri manusia dan masyarakat Indonesia melalui peningkatan peran serta, efisiensi, dan produktivitas rakyat dalam rangka meningkatkan taraf hidup, kecerdasan, dan kesejahteraan lahir batin.

Dengan ditetapkannya bidang ekonomi sebagai titik berat yang merupakan penggerak utama Pembangunan Jangka Panjang Kedua, seiring dengan kualitas sumber daya manusia, maka prioritas Pembangunan Lima Tahun Keenam adalah pembangunan sektor-sektor di bidang ekonomi dengan keterkaitan antara industri dan pertanian serta bidang pembangunan lainnya dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.



PROGRAM PEMBANGUNAN NASIONAL PROPENAS 2000-2004

Propenas, sebagai penjabaran dari GBHN 1999-2004, merupakan rencana pembangunan lima tahunan dengan kerangka waktu yakni tahun 2000-2004. Definisi Propenas sendiri adalah rencana pembangunan yang berskala nasional serta merupakan konsensus dan komitmen bersama masyarakat Indonesia mengenai pencapaian visi dan misi bangsa. Propenas berfungsi untuk menyatukan pandangan dan derap langkah seluruh lapisan masyarakat dalam melaksanakan prioritas pembangunan selama lima tahun. Perumusan Propenas dilakukan secara transparan dengan mengikutsertakan berbagai pihak baik kalangan pemerintah, dunia usaha, dunia pendidikan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), maupun para pakar, baik di pusat maupun di daerah. Ini didasari atas Propenas tidak hanya rencana pembangunan pemerintah pusat saja, tetapi rencana pembangunan seluruh komponen bangsa. Lebih jauh lagi, proses penyusunan Propenas yang dilakukan secara transparan akan meningkatkan rasa tanggung jawab dan mendorong pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik.



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL 2005-2025

Dengan tidak adanya Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan nasional dan diperkuatnya otonomi daerah dan desentralisasi pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka untuk menjaga pembangunan yang berkelanjutan, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional sangat diperlukan. Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang memerintahkan penyusunan RPJP Nasional yang menganut paradigma perencanaan yang visioner, maka RPJP Nasional hanya memuat arahan secara garis besar. Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkan Undang-Undang tentang RPJP Nasional Tahun 2005-2025 adalah untuk: (a) mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan dalam pencapaian tujuan nasional, (b) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antardaerah, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah, (c) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, (d) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan, dan (e) mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Rencana pembangunan jangka panjang nasional diwujudkan dalam visi, misi dan arah pembangunan nasional yang mencerminkan cita-cita kolektif yang akan dicapai oleh bangsa Indonesia serta strategi untuk mencapainya.



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL 2004-2009

Visi Pembangunan Nasional Tahun 2004-2009, yaitu:

1. Terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang aman, bersatu, rukun dan damai;
2. Terwujudnya masyarakat, bangsa, dan negara yang menjunjung tinggi hukum, kesetaraan, dan hak asasi manusia; serta
3. Terwujudnya perekonomian yang mampu menyediakan kesempatan kerja dan penghidupan yang layak serta memberikan pondasi yang kokoh bagi pembangunan yang berkelanjutan.

Di dalam mewujudkan visi pembangunan nasional tersebut di atas ditempuh 2 (dua) Strategi Pokok Pembangunan, yaitu:

1. Strategi Penataan Kembali Indonesia yang diarahkan untuk menyelamatkan sistem ketatanegaraan Republik Indonesia berdasarkan semangat, jiwa, nilai, dan konsensus dasar yang melandasi berdirinya Negara Kebangsaan Republik Indonesia yang meliputi Pancasila; Undang-Undang Dasar 1945 (terutama Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945); tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan tetap berkembangnya pluralisme dan keberagaman dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika.
2. Strategi Pembangunan Indonesia yang diarahkan untuk membangun Indonesia di segala bidang yang merupakan perwujudan dari amanat yang tertera jelas dalam Pembukaan UUD 1945 terutama dalam pemenuhan hak dasar rakyat dan penciptaan landasan pembangunan yang kokoh.



RENCANA KERJA PEMERINTAH 2005

Rencana Kerja Pemerintah 2005 berisi kebijakan pembangunan baik yang terkait dengan kebijakan APBN maupun yang diarahkan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Terdapat 3 (tiga) agenda pembangunan yaitu: Mempercepat reformasi; meningkatkan kesejahteraan rakyat; serta memperkokoh kesatuan dan persatuan bangsa dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam pelaksanaannya, ketiga agenda pembangunan nasional tersebut dijabarkan dalam prioritas dan langkah-langkah kebijakan dalam berbagai bidang pembangunan dengan mempertimbangkan pengarusutamaan gender (*gender mainstreaming*) dan pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan. Tercapainya kesepakatan Helsinki pada tanggal 15 Agustus 2005 merupakan kemajuan yang sangat berarti dalam upaya penyelesaian masalah separatisme di Aceh. Penghancuran seluruh persenjataan milik GAM, penarikan pasukan non organik TNI dan Polri, serta timbulnya kesadaran bersama akan pentingnya kedamaian, merupakan modal dasar pencapaian kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat Aceh yang sedang melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa Tsunami.



RENCANA KERJA PEMERINTAH 2006

"Menyelesaikan reformasi menyeluruh untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat".

Prioritas pembangunan pada tahun 2006 adalah prioritas yang terfokus pada upaya penyelesaian masalah mendesak dan berdampak luas bagi peningkatan kesejahteraan rakyat serta didukung oleh upaya-upaya untuk menciptakan keadaan Indonesia yang lebih aman dan adil serta demokratis. Prioritas-prioritas tersebut diantaranya; Prioritas penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan; Prioritas peningkatan kesempatan kerja, investasi dan ekspor; Prioritas revitalisasi pertanian, perikanan, kehutanan dan perdesaan; Prioritas peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan; Prioritas penegakan hukum, pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi; Prioritas penguatan kemampuan pertahanan, pemantapan keamanan dan ketertiban serta penyelesaian konflik; Prioritas rehabilitasi dan rekonstruksi Nanggroe Aceh Darussalam dan Nias (Sumatera Utara). Dalam tahun 2006, rasio utang terhadap PDB menurun menjadi sekitar 40 persen; lebih rendah dari tahun 2004 (56,3 persen). Di samping pelunasan utang IMF empat tahun lebih cepat dari yang ditentukan, Pemerintah juga telah memutuskan untuk mengakhiri program CGI (*Consultative Group on Indonesia*). Keputusan ini dimaksudkan agar penetapan agenda dan prioritas, alokasi anggaran, penentuan sumber pembiayaan, dan implementasi pembangunan benar-benar independen mengacu pada kepentingan nasional.



RENCANA KERJA PEMERINTAH 2007

"Meningkatkan kesempatan kerja dan menanggulangi kemiskinan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat".

Prioritas pembangunan nasional pada tahun 2007 adalah sebagai berikut: 1). Penanggulangan Kemiskinan; 2) Peningkatan Kesempatan Kerja, Investasi, dan Ekspor; 3) Revitalisasi Pertanian, Perikanan, Kehutanan, dan Perdesaan; 4) Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan; 5) Penegakan Hukum dan HAM, Pemberantasan Korupsi, dan Reformasi Birokrasi; 6) Penguatan Kemampuan Pertahanan, Pemantapan Keamanan dan Keteriban, serta Penyelesaian Konflik; 7) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Nias (Sumatera Utara), Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah, serta Mitigasi dan Penanggulangan Bencana; 8) Percepatan Pembangunan Infrastruktur; serta 9) Pembangunan Derah Perbatasan dan Wilayah Terisolir.



RENCANA KERJA PEMERINTAH 2008

"Percepatan pertumbuhan ekonomi untuk Mengurangi kemiskinan dan pengangguran".

Prioritas pembangunan nasional pada tahun 2008 adalah sebagai berikut:

1) Peningkatan Investasi, Ekspor, dan Kesempatan Kerja; 2) Revitalisasi Pertanian, Perikanan, Kehutanan, dan Pembangunan Perdesaan; 3) Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Pengelolaan Energi; 4) Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan; 5) Peningkatan Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan; 6) Pemberantasan Korupsi dan Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi; 7) Penguatan Kemampuan Pertahanan dan Pemantapan Keamanan Dalam Negeri; 8) Penanganan Bencana, Pengurangan Risiko Bencana, dan Peningkatan Penanggulangan Flu Burung. Di bidang lingkungan hidup telah dilaksanakan pemberian penghargaan kepada kota yang memenuhi standar pengelolaan lingkungan perkotaan (Adipura), program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup (PROPER), program kali bersih, program langit biru, pembinaan tim penilai AMDAL, program menuju Indonesia hijau, program *Debt Swap for Nature* dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu juga telah dilaksanakan penanganan asap secara bersama untuk negara-negara ASEAN, kegiatan di bidang perlindungan lapisan ozon melalui penghapusan pemakaian bahan perusak ozon (BPO), dan peningkatan kapasitas daerah di bidang lingkungan hidup, melalui kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang lingkungan hidup kepada pemerintah daerah.



RENCANA KERJA PEMERINTAH 2009

"Peningkatan kesejahteraan rakyat dan pengurangan kemiskinan".

Prioritas pembangunan nasional pada tahun 2009 adalah Peningkatan Pelayanan Dasar dan Pembangunan Perdesaan; Percepatan Pertumbuhan yang Berkualitas dengan Memperkuat Daya Tahan Ekonomi yang didukung oleh Pembangunan Pertanian, Infrastruktur, dan Energi, serta Peningkatan Upaya Anti Korupsi, Reformasi Birokrasi, serta Pemantapan Demokrasi dan keamanan dalam Negeri. Dalam 2009, upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin masih menjadi agenda utama pembangunan, terutama dengan terjadinya krisis finansial global yang berdampak pada sektor riil dan selanjutnya menghambat upaya-upaya untuk mempercepat penurunan kemiskinan. Terkait dengan pemberian perlindungan sosial bagi masyarakat miskin, telah dilaksanakan berbagai program seperti RASKIN (program beras untuk masyarakat miskin), Jamkesmas (program jaminan kesehatan masyarakat), beasiswa siswa miskin, BLT (bantuan langsung tunai) dan PKH (program keluarga harapan). Untuk mendukung pembangunan perdesaan telah dilaksanakan program-program pemberdayaan masyarakat miskin melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. penguatan kepada kelembagaan di tingkat masyarakat serta kelembagaan ekonomi di tingkat lokal seperti Lembaga Keuangan Perdesaan, Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP) dan Badan Kredit Desa (BKD), Badan Usaha Milik Kelurahan (BUMKEL) serta Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) juga menjadi perhatian dalam pelaksanaan kegiatan di perdesaan dan daerah-daerah tertinggal.



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL 2010-2014

Visi Pembangunan 2010-2014 adalah terwujudnya Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan Untuk mewujudkan visi ini juga telah ditetapkan 3 (tiga) misi yang harus diemban yakni: Misi 1: Melanjutkan Pembangunan Menuju Indonesia yang Sejahtera Misi 2: Memperkuat Pilar-Pilar Demokrasi Misi 3: Memperkuat Dimensi Keadilan di Semua Bidang. RPJMN 2010-2014 disusun dalam tiga buku yang merupakan satu kesatuan yang utuh.

- Buku I memuat strategi, kebijakan umum, dan kerangka ekonomi makro penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Aksi serta sekelas prioritas pembangunan nasional dari Presiden-Wakil Presiden, Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono dengan visi: "Terwujudnya Indonesia Yang Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan."
- Buku II memuat rencana pembangunan bidang-bidang kehidupan masyarakat dengan tema: "Memperkuat Sinergi Antarbidang Pembangunan"
- Buku III memuat rencana pembangunan kewilayahan yang disusun dengan tema: "Memperkuat Sinergi Antara Pusat dan Daerah dan Antardaerah"





RENCANA KERJA PEMERINTAH 2010

"Pemulihan perekonomian nasional dan pemeliharaan kesejahteraan rakyat."

Rencana Kerja Pemerintah ini terdapat 8 (delapan) prinsip-prinsip pengarusutamaan dan 3 (tiga) isu-isu lintas sektor yang menjadi landasan operasional bagi seluruh aparatur negara, yaitu: Pengarusutamaan partisipasi masyarakat; Pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan; Pengarusutamaan gender; Pengarusutamaan tata pengelolaan yang baik (*good governance*); Pengarusutamaan pengurangan kesenjangan antarwilayah dan percepatan pembangunan daerah tertinggal; Pengarusutamaan desentralisasi dan otonomi daerah; Pengarusutamaan padat karya; Pengarusutamaan berdimensi kepulauan; Isu lintas-sektor tentang perlindungan anak; Isu Lintas Sektor tentang Penanggulangan HIV dan AIDS; Isu Lintas Sektor tentang Perbaikan Gizi.

Prioritas pembangunan nasional pada tahun 2010 adalah sebagai berikut:

1). Pemeliharaan Kesejahteraan Rakyat, serta Penataan Kelembagaan dan Pelaksanaan Sistem Perlindungan Sosial. 2). Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia. 3). Pemantapan Reformasi Birokrasi dan Hukum, serta Pemantapan Demokrasi dan Keamanan Nasional. 4). Pemulihan Ekonomi yang Didukung oleh Pembangunan Pertanian, Infrastruktur, dan Energi. 5). Peningkatan Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Kapasitas Penanganan Perubahan Iklim.



RENCANA KERJA PEMERINTAH 2011

"Percepatan pertumbuhan ekonomi Yang berkeadilan didukung oleh pemantapan tatakelola dan sinergi pusat daerah."

Sasaran pembangunan tahun 2011 akan dikelompokkan ke dalam tiga bagian yakni: (1) sasaran pembangunan kesejahteraan, (2) sasaran penguatan pembangunan demokrasi, dan (3) sasaran penegakan hukum. RKP 2011 memuat 3 (tiga) buku yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan masing-masing memuat hal-hal sebagai berikut: Buku I memuat Tema Pembangunan tahun 2011 dan Prioritas Nasional yang terdiri dari 11 (sebelas) Prioritas Nasional dan 3 (tiga) Prioritas Lainnya dari RPJMN 2010-2014 serta kegiatan prioritas nasional menuju terwujudnya Visi, Misi dari Presiden-Wakil Presiden, Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono.

Buku II memuat rencana pembangunan di semua bidang-bidang kehidupan masyarakat sebagaimana yang tertuang dalam RPJPN 2005–2025 dalam rangka mewujudkan sasaran RKP 2011 yang tercantum dalam Buku I. Buku III memuat rencana pembangunan kewilayahan dalam rangka mewujudkan sasaran RKP 2011 yang tercantum dalam Buku I.



RENCANA KERJA PEMERINTAH 2012

"Percepatan dan perluasan pertumbuhan Ekonomi yang inklusif dan berkeadilan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat."

RKP 2012 disusun dengan mencermati keberhasilan pembangunan yang diperoleh dalam tahun 2010 dan perkiraan pencapaian hasil pembangunan pada tahun 2011, serta mempertimbangkan permasalahan dan tantangan yang diperkirakan terjadi pada tahun 2012. Prakarsa-prakarsa baru dalam RKP 2012 dimaksudkan sebagai pengungkit dalam mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat, yang terdiri dari : Pertama adalah Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) tahun 2011-2025. Masterplan ini memuat: (i) peningkatan potensi ekonomi wilayah melalui pengembangan 6 (enam) koridor ekonomi, yaitu: koridor Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku-Papua, Bali dan Nusa Tenggara; (ii) penguatan konektivitas nasional; dan (iii) penguatan kemampuan SDM dan Iptek; Kedua adalah percepatan pembangunan Papua, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur; Ketiga adalah 6 (enam) program penguatan upaya penanggulangan kemiskinan yang disebut sebagai kluster keempat, sebagai tambahan dari 3 (tiga) kluster program-program penanggulangan kemiskinan yang telah berjalan. Keenam program dari kluster keempat tersebut adalah: (1) Program Rumah Sangat Murah; (2) Program Kendaraan Angkutan Umum Murah; (3) Program Air Bersih Untuk Rakyat; (4) Program Listrik Murah dan Hemat; (5) Program Peningkatan Kehidupan Nelayan; dan (6) Program Peningkatan Kehidupan Masyarakat Pinggir Perkotaan. Keempat adalah peningkatan langkah-langkah dalam rangka mencapai ketahanan pangan dimana surplus beras 10 juta ton per tahun harus dicapai dalam waktu 5-10 tahun, perluasan lapangan kerja, serta penanganannya transportasi kota-kota besar, khususnya Jakarta.



RENCANA KERJA PEMERINTAH 2013

"Memperkuat perekonomian domestik, peningkatan Dan perluasan kesejahteraan rakyat."

Tema RKP 2013 dituangkan dalam 11 Prioritas Nasional dan 3 Prioritas lainnya, yaitu: Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; Pendidikan; Kesehatan; Penanggulangan Kemiskinan; Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013 Buku 1 Ringkasan Eksekutif; Ketahanan Pangan; Infrastruktur; Iklim Investasi dan Iklim Usaha; Energi; Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana; Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca-Konflik; Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi; Bidang Politik, Hukum dan Keamanan lainnya; Bidang Perekonomian lainnya; Bidang Kesejahteraan Rakyat lainnya.

Fokus dari kegiatan 11 Prioritas Nasional dan 3 Prioritas lainnya ditekankan kepada penanganan isu-isu strategis; Peningkatan daya saing 1. Peningkatan Iklim Investasi dan Usaha; 2. Percepatan Pembangunan Infrastruktur; 3. Peningkatan Pembangunan Industri di Berbagai Koridor Ekonomi; 4. Penciptaan Kesempatan Kerja khususnya Tenaga Kerja Muda; Peningkatan daya tahan ekonomi 5. Peningkatan Ketahanan Pangan; Menuju Pencapaian Surplus Beras 10 juta ton; 6. Peningkatan Rasio Elektrifikasi dan Konversi Energi; Peningkatan dan perluasan kesejahteraan rakyat 7. Peningkatan Pembangunan Sumberdaya Manusia; 8. Percepatan Pengurangan Kemiskinan; Sinergi Klaster HV; Pemantapan stabilitas sosial politik 9. Persiapan Pemilu 2014; 10. Perbaikan Kinerja Birokrasi dan Pemberantasan Korupsi; 11. Percepatan Pembangunan *Minimum Essential Force*.



RENCANA KERJA PEMERINTAH 2014

"Memantapkan perekonomian nasional bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan."

RKP 2014 dibagi dalam 3 (tiga) bagian, yaitu pertama, yang diarahkan untuk mencapai sasaran-sasaran prioritas pembangunan nasional, kedua untuk memperkuat pembangunan di berbagai bidang pembangunan, serta ketiga untuk memperkokoh kesatuan wilayah pembangunan seluruh Indonesia.

RKP 2014 terdiri atas 3 (tiga) buku yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan masing-masing memuat hal-hal sebagai berikut: Buku I memuat Tema Pembangunan Tahun 2014 dan Prioritas Nasional yang terdiri dari 11 (sebelas) Prioritas Nasional dan 3 (tiga) Prioritas Nasional Lainnya dari RPJMN 2010-2014 serta Isu Strategis menuju terwujudnya Visi, Misi dari Presiden-Wakil Presiden, Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono.

Buku II memuat rencana pembangunan di semua bidangbidang pembangunan nasional sebagaimana yang tertuang dalam RPJPN 2005–2025 dalam rangka mewujudkan sasaran RKP 2014 yang tercantum dalam Buku I. Buku III memuat rencana pembangunan kewilayahan dalam rangka mewujudkan sasaran RKP 2014 yang tercantum dalam Buku I.



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL 2015-2019

Berpayung kepada UUD 1945 dan UU No. 17 Tahun 2007 tentang RPJP, RPJMN 2015- 2019 disusun sebagai penjabaran dari Visi, Misi, dan Agenda (Nawa Cita) Presiden/Wakil Presiden, Joko Widodo dan Muhammad Jusuf Kalla. VISI PEMBANGUNAN NASIONAL 2015-2019: "Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong". Agenda satu tahun pertama dalam Pembangunan Jangka Menengah 2015-2019, juga dimaksudkan sebagai upaya membangun fondasi untuk melakukan akselerasi yang berkelanjutan pada tahun-tahun berikutnya, disamping melayani kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat yang tergolong mendesak.

Dengan berlandaskan fondasi yang lebih kuat, pembangunan pada tahun-tahun berikutnya dapat dilaksanakan dengan lancar. Sementara, agenda lima tahun selama tahun 2015-2019 sendiri diharapkan juga akan meletakkan fondasi yang kokoh bagi tahap-tahap pembangunan selanjutnya. Dengan demikian, strategi pembangunan jangka menengah, termasuk di dalamnya strategi pada tahun pertama, adalah strategi untuk menghasilkan pertumbuhan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat secara berkelanjutan.





RENCANA KERJA PEMERINTAH 2015

RKP 2015 yang disusun oleh Kabinet Indonesia Bersatu II dengan tema melanjutkan Reformasi bagi percepatan pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan kemudian direvisi melalui Perpres Nomor 3 Tahun 2015 dengan fokus pembangunan pada infrastruktur. Pembangunan tahun 2015 diarahkan sebagai tahap penguatan fondasi bagi percepatan pencapaian tujuan pembangunan yaitu Indonesia yang lebih berdaulat dalam politik, lebih berdaya dalam bidang ekonomi, dan lebih berkepribadian dalam bidang kebudayaan. Prioritas pembangunan disusun sebagai penjabaran operasional dari Nawacita yaitu: (1) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara; (2) Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya; (3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan; (4) Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya; (5) Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia; (6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional; (7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik; (8) Melakukan revolusi karakter bangsa; dan (9) Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. RKP Tahun 2015 terdiri dari 3 (tiga) buku yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan masing-masing memuat hal-hal sebagai berikut: Buku I Memuat Tema Pembangunan Tahun 2015 dan Isu-isu Strategis Pembangunan Tahun 2015 yang dikelompokkan ke dalam 9 (sembilan) bidang pembangunan yang tercantum dalam RPJPN 2005-2025. Buku II Memuat rencana pembangunan di semua bidang-bidang pembangunan nasional sebagaimana yang tertuang dalam RPJPN 2005–2025 dalam rangka mewujudkan sasaran RKP 2015 yang tercantum dalam Buku I. Buku III Memuat rencana pembangunan kewilayahan dalam rangka mewujudkan sasaran RKP 2015 yang tercantum dalam Buku I.



RENCANA KERJA PEMERINTAH 2016

"Mempercepat pembangunan Infrastruktur untuk memperkuat fondasi pembangunan yang berkualitas".

Prioritas pembangunan disusun sebagai penjabaran operasional dari Strategi Pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2015-2019 dalam upaya melaksanakan Agenda Pembangunan Nasional untuk memenuhi Nawacita, yaitu:

Cita 1 : Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara; Cita 2 : Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya; Cita 3 : Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan; Cita 4 : Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya; Cita 5 : Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia; Cita 6 : Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional; Cita 7 : Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik; Cita 8 : Melakukan revolusi karakter bangsa; dan Cita 9 : Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. Sasaran Pokok RKP 2016 disusun sebagai berikut: 1. Sasaran Makro; 2. Sasaran Pembangunan Manusia dan Masyarakat; 3. Sasaran Pembangunan Sektor Unggulan; 4. Sasaran Dimensi Pemerataan; 5. Sasaran Pembangunan Wilayah dan Antarwilayah; 6. Sasaran Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan.



RENCANA KERJA PEMERINTAH 2017

"Memacu pembangunan infrastruktur dan ekonomi untuk meningkatkan kesempatan kerja serta mengurangi kemiskinan dan kesenjangan antar wilayah".

Strategi Pembangunan dirumuskan dalam: 1) Norma Pokok pembangunan Kabinet Kerja; 2) Prioritas Pembangunan yang dibagi ke dalam tiga dimensi pembangunan dan kondisi perlu; dan 3) penekanan (fokus) tahunan yang tercermin dalam tema pembangunan. Norma pokok pembangunan Kabinet Kerja: pembangunan bersifat *holistic* komprehensif memperhatikan seluruh dimensi terkait; pembangunan untuk manusia dan masyarakat harus memberdayakan masyarakat untuk mandiri dan tidak justru menyebabkan masyarakat menjadi lemah (entitled society); pembangunan tidak menciptakan ketimpangan yang semakin lebar; pembangunan tidak boleh merusak dan menurunkan daya dukung lingkungan dan ekosistem; pembangunan harus mendorong tumbuh berkembangnya swasta dan tidak justru mematikan usaha yang sudah berjalan.



RENCANA KERJA PEMERINTAH 2018

"Memacu investasi dan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan."

Penyusunan RKP tahun 2018 dengan prinsip *money follows program* menggunakan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial dengan penajaman substansi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi. Pendekatan tersebut dilakukan dalam rangka mengupayakan integrasi substansi (hulu-hilir/holistik); integrasi spasial (keterkaitan kegiatan dalam suatu lokasi); pembagian kewenangan (kerangka regulasi) antar Kementerian/Lembaga (K/L), provinsi, kabupaten/kota; dan pembagian sumber pendanaan (kerangka pendanaan) K/L, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Dana Alokasi Khusus (DAK), pembiayaan investasi, dan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), serta upaya pemanfaatan Pembiayaan Investasi Non APBN (PINA). Kerangka pendanaan pada RKP tahun 2018 difokuskan pada peningkatan kualitas belanja publik dengan tetap memperhatikan pendanaan untuk rencana pencapaian prioritas nasional. Kebijakan pendanaan tetap diarahkan untuk memperkuat *money follow program* sebagaimana telah diimplentasikan pada RKP tahun 2017, melalui perkuatan aspek pengendalian perencanaan dalam kerangka pencapaian prioritas nasional. Pengendalian program prioritas dilakukan hingga pada proyek prioritas. Perencanaan dan pendanaan program prioritas pembangunan juga disertai dengan langkah pengintegrasian kebijakan antar sektor yang mencakup pengintegrasian dan optimalisasi potensi sumber pendanaan pembangunan seperti belanja Kementerian/Lembaga (K/L), subsidi/PSO, Dana Transfer Khusus, Dana Desa, hibah daerah yang diarahkan pada pelayanan dasar dan konektivitas, dan lain sebagainya.



RENCANA KERJA PEMERINTAH 2019

RKP Tahun 2019 merupakan penjabaran tahun terakhir dari RPJMN 2015-2019 yang memuat hasil evaluasi pencapaian Prioritas Nasional (PN) RKP 2017, rancangan kerangka ekonomi makro, arah pengembangan wilayah, pendanaan pembangunan, serta kaidah pelaksanaan.

Dokumen RKP tahun 2019 menjabarkan rencana pembangunan ke dalam Prioritas Pembangunan Nasional dan pembangunan bidang. Pendekatan dilakukan dalam rangka mengupayakan integrasi substansi (hulu-hilir/holistik); integrasi spasial (keterkaitan kegiatan dalam suatu lokasi); pembagian kewenangan (kerangka regulasi) antar-K/L, provinsi, kabupaten/kota; pembagian sumber pendanaan (kerangka pendanaan); penatakelolaan (kerangka kelembagaan); dan kemudahan berusaha (kerangka pelayanan umum dan investasi).

Penjabaran RKP 2019 ke 5 Pembangunan Nasional meliputi: (1) Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar; (2) Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah melalui Konektivitas dan Kemaritiman; (3) Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya; (4) Pemanjatan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air; serta (5) Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu. Hal ini diharapkan mendorong percepatan integrasi pembangunan pusat-daerah.



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL 2020-2024

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 memiliki tujuh Agenda Pembangunan dengan pendekatan yang berbeda dibandingkan periode sebelumnya, yaitu memuat 41 Proyek Prioritas Strategis/Ma7br Project (MP) dengan daya ungkit tinggi. Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN ke IV tahun 2020-2024 yang merupakan amanat RPJPN 2005-2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir. Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan yang didalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas. Tujuan RPJMN IV tahun 2020 - 2024 telah sejalan dengan *Sustainable Development Goals (SDGs)*.





RENCANA KERJA PEMERINTAH 2020

"Peningkatan sumber daya manusia untuk pertumbuhan berkualitas".

Kebijakan perencanaan dan penganggaran dalam RKP 2020 tetap diendalikkan sesuai dengan tujuan dan manfaat yang dicapai (*policy-driven*), dan beringan dengan ketersediaan anggaran (*budget-driven*) atau tugas dan fungsi organisasi. Pendekatan perencanaan dan penganggaran yang bersifat *money follows program* tersebut dimaksudkan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional maupun daerah secara lebih efektif, efisien, dan berkeadilan

Dokumen RKP tahun 2020 memuat hasil evaluasi pencapaian Prioritas Nasional (PN) RKP 2018, rancangan kerangka ekonomi makro, arah pengembangan wilayah, pendanaan pembangunan, prioritas pembangunan nasional, pembangunan bidang, serta kaidah pelaksanaan. Tema pembangunan tahun 2020 adalah "Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk Pertumbuhan Berkualitas" yang ditujukan untuk menjaga keberlanjutan pencapaian hasil-hasil pembangunan RPJMN 2015-2019 dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya dalam rangka pelaksanaan RPJMN 2020-2024.

Penjabaran RKP tahun 2020 ke dalam 5 (lima) PN meliputi: (1) Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan; (2) Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah; (3) Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja; (4) Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup; serta (5) Stabilitas Pertahanan dan Keamanan. Sasaran prioritas pembangunan yang menjadi fokus pada tahun 2020 diharapkan dapat tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan.



RENCANA KERJA PEMERINTAH 2021

"Mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial."

Perencanaan pembangunan pada tahun 2021 ditekankan pada pemulihan kehidupan masyarakat dan roda perekonomian untuk dapat kembali berjalan lancar, maka tema RKP 2021, "Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial". Dokumen RKP 2021 menjabarkan rencana pembangunan secara lebih rinci ke dalam PN, PP, KP, dan MP dengan menjaga kesinambungan hierarki sasaran dan ketepatan indikator sasaran di setiap tingkatan kinerja untuk memastikan tercapainya sasaran dan target pembangunan serta terlaksananya evaluasi dan pengendalian pencapaian sasaran PN secara efektif. Adapun tujuh PN RKP 2021 meliputi (1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan; (2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; (3) Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing; (4) Revolusi mental dan pengembangan kebudayaan; (5) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; (6) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim; serta (7) Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.



RENCANA KERJA PEMERINTAH 2022

"Pemulihan ekonomi dan reformasi struktural."

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun sebagai penjabaran tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Selain itu penyusunan RKP juga dilakukan dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 memuat arah kebijakan nasional tahunan demi menjaga kesinambungan pembangunan secara terencana dan sistematis yang tanggap akan perubahan. RKP Tahun 2022 telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022. Sesuai dengan Pasal 5 Perpres tersebut, RKP Tahun 2022 dimutakhirkan berdasarkan pada UU APBN. Dengan ditetapkannya UU Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 APBN, maka dilakukan pemutakhiran RKP Tahun 2022.



RENCANA KERJA PEMERINTAH 2023

“Peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.”

Melalui RKP Tahun 2023 pemerintah berkomitmen untuk memberikan arahan pada: (1) kebijakan prioritas nasional yang komprehensif dan sistematis, (2) kerangka pendanaan, (3) kerangka kelembagaan, (4) kerangka regulasi, serta (5) kerangka evaluasi dan pengendalian, dalam melaksanakan pembangunan nasional. Penyusunan RKP mengacu pada regulasi yang tertuang dalam Undang-Undang (UU) No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 17/2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. RKP Tahun 2023 telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023. Sesuai Pasal 7 pada Perpres tersebut, dilakukan pemutakhiran RKP Tahun 2023 dengan berdasarkan Undang-Undang APBN yang telah ditetapkan melalui UU Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023.



EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL 2005-2025

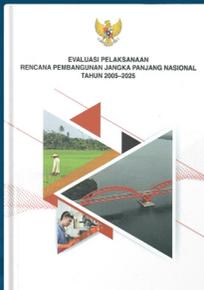
Pertama, evaluasi kinerja pembangunan dilakukan untuk mendapatkan gambaran perkembangan kinerja pembangunan selama 20 tahun terakhir dengan menentukan proksi/perwakilan indikator pembangunan nasional, yang disepakati dapat mewakili kinerja makro maupun kinerja bidang pembangunan. Berdasarkan hasil analisis perkembangan kinerja, dari perwakilan 142 indikator pembangunan nasional sebanyak 79,58 persen mengalami perkembangan kinerja yang meningkat dengan 45,77 persen di antaranya diperkirakan akan mampu memenuhi hasil akhir yang diharapkan dan 24,65 persen masih memerlukan upaya percepatan. Kedua, evaluasi efektivitas kebijakan strategis dilakukan untuk mendeskripsikan proses pelaksanaan kebijakan strategis pada sembilan bidang pembangunan, serta mengidentifikasi permasalahan untuk memperbaiki pelaksanaan pada masa yang akan datang. Komparasi efektivitas kebijakan strategis dilakukan dengan negara benchmark, yaitu Thailand dan China. Kedua negara tersebut dipilih mengingat karakteristik yang mirip dengan Indonesia dan memiliki fokus pemerataan ekonomi di seluruh sektor dan wilayah.

Pertama, evaluasi kinerja pembangunan dilakukan untuk mendapatkan gambaran perkembangan kinerja pembangunan selama 20 tahun terakhir dengan menentukan proksi/perwakilan indikator pembangunan nasional, yang disepakati dapat mewakili kinerja makro maupun kinerja bidang pembangunan. Berdasarkan hasil analisis perkembangan kinerja, dari perwakilan 142 indikator pembangunan nasional sebanyak 79,58 persen mengalami perkembangan kinerja yang meningkat dengan 45,77 persen di antaranya diperkirakan akan mampu memenuhi hasil akhir yang diharapkan dan 24,65 persen masih memerlukan upaya percepatan. Kedua, evaluasi efektivitas kebijakan strategis dilakukan untuk mendeskripsikan proses pelaksanaan kebijakan strategis pada sembilan bidang pembangunan, serta mengidentifikasi permasalahan untuk memperbaiki pelaksanaan pada masa yang akan datang. Komparasi efektivitas kebijakan strategis dilakukan dengan negara benchmark, yaitu Thailand dan China. Kedua negara tersebut dipilih mengingat karakteristik yang mirip dengan Indonesia dan memiliki fokus pemerataan ekonomi di seluruh sektor dan wilayah.



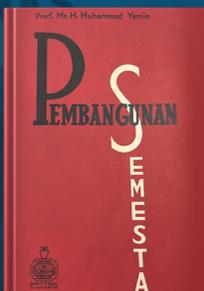
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL 2005-2025

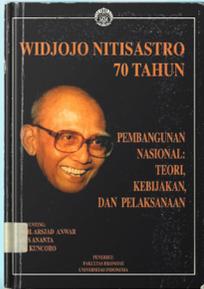
Rencana pembangunan jangka panjang nasional diwujudkan dalam visi, misi dan arah pembangunan nasional yang mencerminkan cita-cita kolektif yang akan dicapai oleh bangsa Indonesia serta strategi untuk mencapainya. Dalam kurun waktu 2005-2025, pembangunan nasional telah menunjukkan kemajuan di berbagai bidang kehidupan masyarakat, yang meliputi bidang sosial budaya dan kehidupan beragama, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), politik, pertahanan dan keamanan, hukum dan aparaturnya pembangunan wilayah dan tata ruang penyediaan sarana dan prasarana, serta pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan lingkungan hidup. Di samping banyak kemajuan yang telah dicapai, tentunya masih banyak pula tantangan atau masalah yang belum sepenuhnya terselesaikan, sehingga memerlukan upaya strategis ataupun percepatan untuk memenuhi hasil akhir yang diharapkan. Adapun garis besar hasil evaluasi pelaksanaan RPJPN 2005-2025 mencakup (1) evaluasi atas bidang pembangunan, yaitu evaluasi atas kinerja pencapaian, efektivitas pelaksanaan, maupun persepsi dampak/manfaat atas pelaksanaan kebijakan strategis pada setiap bidang pembangunan; serta (2) perkiraan pencapaian delapan misi pembangunan RPJPN 2005-2025 berdasarkan kondisi perkembangan kinerja pembangunan sekaligus persepsi masyarakat atas dampak/manfaat pelaksanaan pembangunan.



PEMBANGUNAN SEMESTA

Pendorong Dapernas supaya merencanakan proyek A dan B bersumber kepada pidato presiden pada 22 Juni 1956. Dalam iktiar untuk menemukan fikiran dan konsep baru yang berfokus pada wilayah kekuasaan Republik Indonesia. Selain itu adanya amanat Heidelberg yang berisi tentang kekayaan alam Indonesia. Dan dengan berpegang teguh kepada Amanat Penderitaan Rakyat serta Manipol maka dibentuklah oleh Depernas proyek A dan proyek pembangunan semesta nasional berencana. Rancangan pembangunan semesta seperti tertera dalam XVII dijlid kerja Dapernas telah disahkan oleh dua ketetapan MPRS pada tahun yang lampau sehingga dengan resmi menjadi garis besar haluan negara dibidang pembangunan. Maka MPRS juga dengan tegas memberi kuasa penuh kepada presiden untuk melaksanakan seluruh pembangunan semesta itu.





WIDJOJO NITISASTRO 70 TAHUN PEMBANGUNAN NASIONAL: TEORI KEBIJAKAN, DAN PELAKSANAAN

oleh: *H. Arsjad Anwar, Aris Ananta, & Ari Kuncoro*

Buku ini berisi berbagai sumber tulisan yang disumbangkan oleh penulis dari berbagai generasi. Banyak yang diantaranya merupakan generasi jauh dari Prof Dr. Widjojo Nitisastro. Pemilihan topik didasarkan pada minat beliau, di Bidang Pembangunan Nasional. Walaupun tulisan ini didasarkan pada minat beliau, Isi tulisan ini belum tentu mencerminkan pandangan beliau. Berbagai tulisan ini merupakan sumbangan pemikiran para penulis dalam rangka ulang tahun yang ke-70 Prof Dr. Widjojo Nitisastro.

(Sumber: Perpustakaan Kementerian PPN/Bappenas) Tahun terbit: 1997



EKONOMI INDONESIA, MAU KE MANA? : KUMPULAN ESAI EKONOMI

oleh: *Boediono*

Buku ini merangkum 10 esai ekonomi Prof. Dr Boediono yang ditulis tahun 1981-2007. Salah satunya pidato pengukuhnya sebagai Guru Besar Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada pada Februari 2007.

(Sumber: Perpustakaan Kementerian PPN/Bappenas) Tahun terbit: 2009.



PERENCANAAN DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

Oleh: *Bintoro Tjokroamidjojo, M.A*

Perencanaan dan pembiayaan adalah dua kata yang tidak dapat dipisahkan. Perencanaan tanpa pembiayaan yang memadai hanyalah angan-angan kosong yang tidak ada manfaatnya, Sedangkan pembiayaan tanpa suatu perencanaan yang baik merupakan pemborosan. Dengan perencanaan yang baik, Pengeluaran-pengeluaran dapat diarahkan menuju ke pencapaian sasaran yang lebih sistematis, konsisten, efisien dan efektif.

(Sumber: Perpustakaan Kementerian PPN/Bappenas) Tahun terbit: 1996.

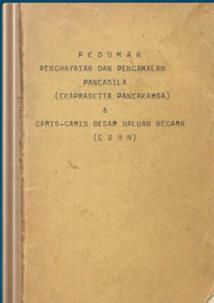


GARIS - GARIS BESAR HALUAN NEGARA (GBHN)

Oleh: Departemen Penerangan RI

Garis-garis besar Haluan Negara (GBHN) yang telah ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Sidang Umum pada bulan Maret 1973, pada hakekatnya merupakan Pola Umum Pembangunan Nasional, yaitu rangkaian program-program pembangunan di segala bidang yang berlangsung secara terus-menerus untuk mewujudkan Tujuan Nasional dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, merakyat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

(Sumber: Perpustakaan Kementerian PPN/Bappenas) Ditetapkan tanggal 23 Maret 1973.



PEDOMAN PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN PANCASILA (EKAPRASETIA PANCAKARSA) & GARIS-GARIS BESAR HALUAN NEGARA (GBHN)

Garis-garis Besar Haluan Negara itu harus memberikan kejelasan arah bagi perjuangan Negara dan Rakyat Indonesia yang dewasa ini sedang membangun, agar dengan demikian dapat mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam waktu lima tahun mendatang dalam rangka kelanjutannya yang berjangka panjang, sehingga secara bertahap dapat diwujudkan cita-cita Bangsa Indonesia.

Oleh karena itu Majelis Permusyawaratan Rakyat yang keanggotaannya diresmikan pada tanggal 1 Oktober 1977, perlu menetapkan Ketetapan yang mengatur Garis-garis Besar Haluan Negara yang didasarkan atas aspirasi dan kepribadian Bangsa Indonesia demi penghayatan dan pengamalan kehidupan kenegaraan yang demokratis-konstitusional berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.



BAPPENAS

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional